

PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Oleh: Mashuri, MA

ABSTRAK

Demokrasi Dalam Pembangunan Politik Di Indonesia". Hal ini dilatar belakangi karena hingga saat ini, demokrasi adalah nilai-nilai politik yang disepakati bisa menjamin tersalurkannya partisipasi politik rakyat. Dalam pandangan banyak orang muncul asumsi bahwa satu-satunya bentuk pembangunan politik yang bermakna adalah pembinaan demokrasi. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi.

Semua ini membawa kita pada persoalan pandangan bahwa pembangunan politik itu seharusnya sama dengan diciptanya lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokrasi. Partisipasi rakyat dalam politik tentulah sangat dibutuhkan oleh negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokratis. Pendidikan politik rakyat, menurut merupakan unsur yang sangat penting bahkan menjadi titik sentral pembangunan politik. Karena hal itu berguna untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan berpolitik rakyat. Namun demikian, pada dataran praksis, upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan politik yang demokratis tidak sedikit mengundang perdebatan, menyangkut strategi pengembangannya.

Selain itu, dalam iklim masyarakat yang pluralis seperti masyarakat Indonesia, nilai-nilai demokrasi dapat dianggap sejalan dengan kenyataan alamiahnya. Mendorong adanya upaya modernisasi ini mestinya diterapkan dalam berbagai kelembagaan politik, pendidikan politik dan pimpinan politik sebagai prasarana dalam pembangunan politik. Karena itu, selagi memberikan alternatif pemecahan terhadap potensi disintegrasi yang selalu terkandung dalam semua masyarakat pluralis, demokrasi perlu di tempatkan pada garda depan wacana pembangunan politik. Demokrasi yang diterapkan berbeda-beda pada negara didunia mempengaruhi keberhasilan yang berbeda pula dalam pembangunan politik di negara tersebut. Bagi bangsa kita sendiri saat ini, masalah pembangunan politik sebenarnya merupakan agenda politik yang terus menjadi perhatian demi terciptanya tatanan kehidupan politis yang lebih demokratis pada masa datang.

1.1. Latar Belakang

Di era modernisasi ini banyak persoalan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat baik secara individual maupun sosial yang menyangkut pola hidup dan tatanan kehidupan yang dijalaninya. Hal ini banyak berkaitan dengan adanya sistem yang berlaku baik dari norma Adat, Budaya, Agama, maupun Hukum.

Salah satu masalah besar yang sering menjadi persoalan dalam bermasyarakat adalah kecenderungan individu-individu dalam masyarakat mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah kepentingan umum yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama. Adanya kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menggunakan hak yang dimiliki mencerminkan ketidakpedulian individu-individu dalam masyarakat terhadap kehidupan masa depan seperti Pemilu Legislatif pada tahun 2014.

Pemilu adalah sebuah pesta Demokrasi yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Legislatif seperti DPR-RI, DPRD Tk I, DPRD Tk II dan DPD dan selanjutnya

akan dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan anggota Legislatif tersebut dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang memilihnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul baik cakupan Indonesia secara umum maupun Daerah seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemilihan Legislatif ini merupakan salah satu wahana yang digunakan dalam menentukan sosok seorang pemimpin yang dibutuhkan dan diharapkan akan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berbagai kebijakan akan diambil oleh wakil rakyat untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan serta tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan peranan partisipasi masyarakat sangat penting. Karena partisipasi masyarakat sangat menentukan bagi keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan dan diharapkan dapat memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Lijan Poltak Senambela (2006: 37), menyatakan bahwa partisipasi ditinjau dari etimologis merupakan padanan

Participation (Bahasa Inggris), yang berarti bagian atau ikut serta. Partisipasi adalah bagian keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan fisik baik itu menyumbang Tenaga, Pikiran, maupun uang. Partisipasi merupakan peran serta seseorang dalam suatu lingkungan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan DPRD yang diharapkan adalah mendapatkan seorang wakil rakyat yang benar-benar sanggup memperjuangkan keinginan masyarakat dan mampu mewujudkan suatu perubahan dan memberikan pelayanan sebaik mungkin agar masyarakat merasa dilindungi serta benar-benar memikirkan kehidupan masyarakatnya.

Lebih lanjut Lijan Poltak Sinambela (2006 : 37), juga mengatakan tujuan dari partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (Keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan di dalamnya. Dimana keputusan publik diambil untuk memberikan kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Artinya, Partisipasi merupakan konsultasi dengan masyarakat atau kelompok lain yang

terkena oleh keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusan. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka pemilihan wakil-wakil rakyat nantinya tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu motivasi memberikan motif atau hal yang menyangkut dorongan seseorang untuk berbuat dan melakukan sesuatu sangat diperlukan.

1.2 Pengertian Partisipasi Politik

Ramlan Subakti (1999:140), Mengemukakan partisipasi adalah keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dalam Negara demokratis sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tidak akan berjalan dengan baik suatu pemerintahan.

Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu, dengan jalan memilih Pemimpin Negara, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Partisipasi politik menurut Meriam Budiarto bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat berbentuk piramida, ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang

satu dibuktikan dirinya unggul dari pada orang lain. Atau dengan perkataan lain struktur piramida kekuasaan terbentuk dalam sejarah masyarakat (Budiarjo, 2004: 36).

Herbert (dalam Budiarjo, 1998:2), mendefinisikan konsep partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif. Yang mana dari definisi tersebut Huntington menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah mencakup kegiatan riil bukan pernyataan sikap, selanjutnya partisipasi politik dilakukan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan politik bagi pengikutnya (James Rosenau dan Nimmo, 2000:126).

Ragamaran mengatakan partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politikpun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik sosialisasi politik

tidak dapat berjalan (Ragamaran, 2002:147).

Milbarth (dalam Surbakti, 1992:143), menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik :

1. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam dunia politik.
2. Karena faktor karakteristik seseorang, orang-orang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya.
3. Faktor krakter sosial seseorang, menyangkut status sosial ekonomi, kelompok persepsi, sikap dan prilaku seseorang dalam bidang politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Menurut (Merphin Panjaitan, 2000:8), mengatakan bahwa demokrasi berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka semakin tinggi kadar Demokrasi Negara tersebut.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Demos* yang artinya

Rakyat dan *Cratos* yang artinya Pemerintahan, dengan demikian berarti pemerintahan rakyat. Sebagai mana diungkapkan Giddes (dalam Ghofur, 2002:15), bahwa demokrasi pada dasarnya mengandung makna sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukan raja atau bangsawan.

Dalam suatu Negara demokrasi, sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat sebagai tolak ukur dari keberhasilan sistem politiknya. Semakin banyak Warga Negara yang berpartisipasi menunjukkan bahwa semakin berhasilnya sistem politik Negara tersebut. Tetapi kalau partisipasi politik Warga Negara rendah maka dapat dikatakan sistem politiknya kurang baik.

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang tidak melibatkan seluruh rakyat tetapi rakyat memberikan kepercayaan kepada para wakilnya untuk membicarakan dan menentukan persoalan-persoalan kenegaraan.

Dalam Demokrasi langsung dapat diterapkan dalam pemilihan seorang pejabat publik, misalnya pemilihan presiden, gubernur atau Bupati/Wali Kota secara langsung. Di negara indonesia

menganut demokrasi langsung karena terlihat dari adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat

Ditinjau dari hubungan antar alat kelengkapan negara itu ada Demokrasi dengan Sistem Parlementer dan demokrasi dengan sistem presidensial. Di Indonesia menggunakan demokrasi presidensial hal itu dapat dilihat Presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara.

Demokrasi dengan Sistem Presidensial, pelaksanaan demokrasi dalam sisten presidensial, yaitu pertanggungjawaban pemerintahan negara berada pada presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara bertanggung jawab langsung kepada rakyat atau lembaga yang mengangkatnya.

1.3 . Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Huntington mengemukakan bahwa partisipasi politik itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk antara lain:

1. Kegiatan pemilihan yang juga mencakup pemberian sumbangan untuk kampanye.
2. Bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon dan lain sebagainya (Arifin, 2003:140).

Sejalan dengan Huntington, Almond (dalam Mas' oed dan Adrews, 1997:48), juga mengemukakan ada dua bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat yakni partisipasi politik konvensional yang meliputi: Pemberian suara, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi individu dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan partisipasi politik non konvensional seperti pengajuan potensi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik manusia serta perang dan gerilya.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2005 : 135-138), partisipasi Warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu :

1. Partisipasi dalam Pemilihan
2. Partisipasi kelompok.
3. Kontak antara Warga Negara dengan Pemerintah
4. Partisipasi Warga Negara secara langsung dilingkungan Pemerintah

Lebih lanjut Huntington menyatakan ada dua sifat partisipasi politik yakni partisipasi otonom dan partisipasi yang mobilisasi. Partisipasi politik yang otonom maksudnya adalah partisipasi spontan yang diberikan seseorang atas keinginannya sendiri. Sedangkan partisipasi yang mobilisasi adalah

partisipasi yang diberikan atas dasar rangsangan atau tindak atas instruksi dan sebagian besar digerakkan oleh loyalitas, rasa cinta, rasa hormat atau rasa takut terhadap seorang pemimpin (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990:173).

Partisipasi yang otonom ini biasanya terdapat dalam masyarakat yang maju sedangkan di Negara berkembang yang masyarakatnya belum begitu maju sering kita jumpai partisipasi yang sifatnya mobilisasi.

1.4. Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *Musyarak* yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, menurut Ralf Linton dalam Abdul syani, 2002 :31), masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Sedangkan ciri-ciri masyarakat yang hidup bersama adalah sebagai berikut :

1. Bercampur untuk waktu yang lama.
2. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan.

3. Mereka merupakan satu sistem hidup bersama.

Dalam kehidupan bermasyarakat antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, karena antara satu dengan yang lain saling ketergantungan. Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, kita selalu memerlukan orang lain, karena kita tahu bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan.

Menurut Harold J. Laski (dalam Meriam Budiardjo, 2004: 34), masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai/terwujudnya keinginan bersama, yang mana mereka hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka dan harus ditaati oleh setiap orang, sehingga mereka hidup dalam keadaan terjaga keamanannya.

Dari apa yang dikemukakan oleh Harold J. Laski dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan manusia perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia, agar terjaga dan terpelihara dari ancaman-ancaman yang merusak kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya aturan (Hukum), manusia akan merasa takut

untuk mengganggu dan berbuat jahat kepada orang lain.

Harold Lasswell (dalam Meriam Budiardjo, 2004 : 33), mengamati kehidupan masyarakat disekelilingnya, yaitu masyarakat Barat ia memperinci delapan nilai yang diingini yaitu :

1. Kekuasaan
2. Pendidikan/Penerangan
3. Kekayaan
4. Kesehatan
5. Keterampilan
6. Kasih sayang
7. Kejujuran
8. Kesegaran

Mariam Budiardjo (2000 : 32), dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang dilayani itu maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus. Dalam kehidupan masyarakat dan dalam hubungannya dengan orang lain, pada dasarnya setiap manusia pasti menginginkan nilai-nilai diatas, karena nilai-nilai diatas merupakan suatu kebutuhan yang ingin diwujudkan dan menjadikan impian bagi setiap orang.

1.5. Hal-hal Yang Mempengaruhi Demokrasi dalam Pembangunan Politik Di Indonesia

Pembangunan politik dapat diartikan secara tepat sebagai pembangunan

demokrasi, dan karena itu *the greater the state of development the greater the advance of liberty, popular sovereignty, and free institutions.*” Konsisten dengan pendekatan ini adalah posisi adanya garis lain pembangunan dengan merujuk pada visi-visi ideologi lain dan komunitas politik yang idealis.

Dari definisi tersebut, yang terpenting adalah adanya elemen-elemen kunci dan pembangunan politik yang meliputi hal-hal berikut. *Pertama*, berkaitan dengan rakyat secara keseluruhan, maka pembangunan politik berarti suatu perubahan dari subyek dan status ke peningkatan sejumlah kontribusi warganegara karena adanya perluasan partisipasi massa, serta perluasan suatu sensitivitas pada prinsip-prinsip *equality* dan penerimaan yang lebih luas lagi akan hukum-hukum yang universalistik. *Kedua*, berkaitan dengan kemampuan pemerintahan dan sistem politik secara umum, pembangunan politik meliputi peningkatan kapasitas dan sistem politik untuk mengatur permasalahan-permasalahan umum, mengontrol kontroversi, dan mengakomodasi tuntutan-tuntutan rakyat. *Ketiga*, berkaitan dengan organisasi-organisasi masyarakat politik, pembangunan politik dimaksudkan untuk terjadinya perluasan diferensiasi struktural,

spesialisasi fungsional, dan perluasan integrasi dan semua organisasi-organisasi yang berpartisipasi di dalamnya.

1.6. Kesimpulan

Demokrasi merupakan sarana guna terciptanya partisipasi politik masyarakat secara luas dengan instrumen pokoknya adalah partai politik (parpol). Partisipasi merupakan persoalan relasi kekuasaan atau relasi ekonomi-politik antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Negara adalah pusat kekuasaan, kewenangan dan kebijakan untuk mengatur (mengelola) alokasi barang-barang (sumberdaya) publik pada masyarakat. Di dalam masyarakat sendiri terdapat hak sipil dan politik, kekuatan massa, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Dengan demikian, partisipasi adalah jembatan penghubung antara negara dan masyarakat agar pengelolaan barang-barang publik membuahakan kesejahteraan dan human well being..

Demokrasi terkait erat dengan kompetisi, partisipasi dan kebebasan rakyat (*civil liberty*). Partai politik dapat juga memerintah sebuah masyarakat. Karena partai politik terkadang cenderung bekerja dalam fungsi-fungsi seperti gerakan massa atau institusi publik. Kompetisi dalam demokrasi terkait dengan adanya pemilihan umum (pemilu). Bahkan, bagi teoritisi

minimalis penganut Schumpeterian (Schumpeter, 1947), pemilu merupakan satu-satunya prasyarat demokrasi. Pembangunan politik dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya politik, struktur-struktur politik yang berwenang serta proses politik. Pembangunan politik sebagai prasyarat penting bagi pengembangan Demokrasi Pancasila secara optimal dalam proses tersebut membutuhkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar, *Komunikasi Politik*, PT Balai Pustaka, Jakarta 2003

Abdul Ghofur, *Demokrasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, PT. Bumi Wali Songo 2002

Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002

Hendry B. Mayor, 2003, *Sistem Politik Demokrasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Harjanto, Nicolaus Teguh Budi. 1997. *Memajukan Demokrasi Mencegah Disintegrasi; Sebuah Wacana Pembangunan Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

Huntington Samuel P. dan Nelson, Joan, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta 1994

Merphin Panjaitan, *Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi*, Jakarta, 2001

Mariam Budiarjo, *Pusat-Pusat Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000

_____, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1998

_____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Myron Weiner, 2001, *Pegerakan Politik di Indonesia*. Jakarta, PT.Rieka Cipta.

Subakti , Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia

Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2007, tentang Partisipasi Masyarakat.

UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu

UU No.11 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah